

Kerjasama UN Women dan Uni Eropa dalam Peningkatan Kesetaraan Gender dari Perspektif Feminisme

Hanindya Ratih Febriana

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2010631260004@student.unsika.ac.id

Abstrak

Isu kesetaraan *gender* merupakan suatu isu yang tidak asing dan sering terjadi di dunia internasional, terutama di negara-negara maju yang seringkali terdapat kasus mengenai kesetaraan *gender*. Budaya patriarki yang tidak dapat terlepas selama ribuan tahun membuat kedudukan laki-laki dipandang lebih tinggi daripada perempuan dan membuat kaum perempuan merasa dijerat dan terpaksa untuk selalu berada dibawah naungan kaum laki-laki. Laki-laki dan perempuan dianggap sebagai ciptaan yang sangat berbeda sehingga hak dan martabat diantara keduanya selalu dipandang sebelah mata dimana kedudukan laki-laki lebih berharga dibanding perempuan. Padahal, jumlah kaum perempuan mayoritas dari jumlah kaum laki-laki dan peran perempuan dalam meningkatkan kualitas generasi penerus sangatlah penting. Kesetaraan *gender* juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimana perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk bebas menentukan pilihan hidup, hak untuk hidup terhormat dan hak untuk bebas dari rasa takut. Dalam hal ini, UN Women dan Uni Eropa melakukan kerjasama untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan agar dapat terhentinya normalisasi kekerasan terhadap perempuan. Uni Eropa berkomitmen kuat untuk mempercepat mencapai kemajuan kesetaraan *gender* di seluruh dunia bersama dengan UN Women. UN Women dianggap sebagai bentuk implementasi dari feminisme yang memperjuangkan hak-hak perempuan karena feminisme memiliki pandangan yang fokus pada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Kesetaraan *Gender*, UN Women, Uni Eropa, Feminisme

Abstract

The issue of gender equality is a familiar issue and often occurs in the international world, especially in developed countries where there are often cases of gender equality. The patriarchal culture that has been inseparable for thousands of years has made the position of men considered superior to women and made women feel ensnared and forced to always be under the auspices of men. Men and women are considered as very different creations so that the rights and dignity between them are always underestimated where the position of men is more valuable than women. In fact, the number of women is the majority of the number of men and the role of women in improving the quality of the next generation is very important. Gender equality is also a human right where women and men have the right to freely make life choices, the right to live in dignity and the right to be free from fear. In this case, UN

Women and the European Union collaborate to encourage women's empowerment and prevent discrimination against women in order to stop the normalization of violence against women. The European Union is strongly committed to accelerating progress towards gender equality around the world together with UN Women. UN Women is considered as a form of implementation of feminism that fights for women's rights because feminism has a view that focuses on the inequality between men and women.

Keywords: Gender Equality, UN Women, Europe Union, Feminism

PENDAHULUAN

Kesetaraan *gender* seringkali kita dengar sebagai suatu persoalan yang terjadi di dunia internasional. Kesetaraan *gender* merupakan hal yang dimana pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan memiliki hak, keadilan, kesempatan dan kedudukan yang sama tanpa terjadinya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh satu pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali mengenai isu kesetaraan *gender* yang terjadi di negara berkembang ataupun negara maju. Arti dari *gender* itu sendiri seringkali disangkut pautkan dengan seks, padahal *gender* dan seks memiliki arti yang sangat berbeda, *gender* digambarkan sebagai suatu pembagian sifat yang dimana pembagian sifat ini terbagi menjadi sifat yang feminisme sesuai dengan karakteristik perempuan pada umumnya dan maskulin sesuai dengan karakteristik laki-laki pada umumnya, sedangkan seks digambarkan sebagai pembagian jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki sesuai ilmu biologis yang ada. Hal ini juga seringkali di salah artikan bahwa kesetaraan *gender* merupakan suatu tindakan yang ingin mengutamakan perempuan dalam berbagai hal, padahal pada kenyataannya bukan hal tersebut yang ingin diwujudkan, tetapi tindakan untuk menyuarakan mengenai hak perempuan dalam berbagai hal.

Keberadaan kesetaraan *gender* membuat perubahan dunia menjadi lebih baik, yang tadinya karena ketidaksetaraan *gender* hanya membuat laki-laki berkembang tanpa adanya kesempatan untuk perempuan mengalami hal yang sama. EIGE menyatakan kesetaraan *gender* dilihat dari hak, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki yang tidak bergantung pada bagaimana mereka akan terlahir sebagai laki-laki atau perempuan dan bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan menjadi sama (*European Institute for Gender Equality, 2018*).

Feminisme merupakan pandangan yang lahir atas kerangka berpikir realis dan liberalis yang dievaluasi terlalu maskulin. Realis merupakan kerangka berpikir yang mempunyai inspirasi dan perkiraan dasar yang dimana hal utamanya adalah kelangsungan hidup negara

itu sendiri. Sementara, liberalisme merupakan kerangka berpikir dari kebalikan realisme. Jika kaum realis cenderung pesimis, kaum libelaris justru mempunyai pandangan positif mengenai sifat manusia bahwa makhluk yang rasional dan bisa menyelesaikan perkara internasional adalah manusia (Jackson dan Sorensen 2013). Dari perspektif feminisme, *gender* terbentuk dari konstruksi sosial yang dilihat sebagai serangkaian karakteristik dan menggambarkan cara bersikap seorang laki-laki dan perempuan yang semestinya. Karakteristik terbagi menjadi feminisme yang terlihat lemah dan emosional seperti perempuan lalu maskulin yang terlihat kuat dan bebas seperti laki-laki (Tickner dan Sjoberg 2016). Maka dari itu, feminisme dapat disebut sebagai gerakan politik dan budaya yang berjuang untuk meningkatkan posisi perempuan agar setara dengan laki-laki.

Isu kesetaraan *gender* tersebut membuat UN Women bergerak untuk mengatasinya. Yang menjadi fokus UN Women dalam meningkatkan kesetaraan gender yaitu meningkatkan partisipasi terhadap perempuan, mengakhiri tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan, perempuan dilibatkan dalam seluruh proses perdamaian, dan membangun berbagai organisasi yang dapat membuat perbedaan untuk kedepannya pada kehidupan perempuan. UN Women dan Uni Eropa sudah bekerja sama cukup lama untuk mencegah dan menghentikan segala bentuk diskriminasi dalam hal kesetaraan *gender*. Bahkan duta besar Uni Eropa turut ambil bagian dalam menangani persoalan ini dan menegaskan komitmen Uni Eropa dalam meningkatkan kesadaran akan kesetaraan *gender* dan melibatkan kaum laki-laki untuk menyuarakan persoalan *gender* untuk menghentikan berbagai bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan. (<https://eeas.europa.eu> diakses 17 Desember 2020). Kesetaraan *gender* yang mengacu pada tingkat feminisme berkembang begitu pesat di Uni Eropa, hal tersebut memberikan pengaruh terhadap sejumlah kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Kebijakan tersebut banyak berisikan tentang kesetaraan *gender* dalam beberapa bidang.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang artinya penulis menampilkan beberapa fakta yang terdapat dari beberapa sumber. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, internet, jurnal, dan berita yang relevan dengan topik yang diteliti dan yang akan dibahas. Jenis data yang digunakan yaitu sekunder yang didapatkan dan diolah kembali oleh

penulis dari berbagai bacaan yang masih terdapat berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulisan ini juga akan menggunakan perspektif feminisme untuk melihat peningkatan kesetaraan *gender*. Munculnya feminisme dianggap sebagai kumpulan pemikiran yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki. (David Marsh & Gerry Stoker, Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik).

Sandra Harding membagi feminisme menjadi 3 tipologi yaitu *feminist empiricism*, *feminist standpoint* dan *feminist postmodernism*. *Feminist empiricism* diambil dari asumsi bahwa bias androsentrik dapat dihilangkan dengan menggunakan norma-norma metodologis yang berlaku mengenai penalaran, logika, observasi, pengukuran, verifikasi dan falsifikasi. Menurut Sandra Harding, *feminist empiricism* memiliki potensi radikal untuk mengeluarkan asumsi-asumsi positivisme dengan menyerang bias androsentrik. Bagi kaum feminis, metode ilmiah tidak salah tetapi hanya saja metode tersebut tidak digunakan dengan benar. Penghapusan bias tersebut adalah tolak ukur yang penting untuk mencapai tujuan pengetahuan yang obyektif. *Feminist standpoint* menyatakan bahwa pengetahuan yang muncul dari pengalaman wanita politik dunia secara aktual lebih netral dan lebih kritis. Para feminis harus melihat keadaan hidup sosial dari sudut pandang pengalaman sosial wanita untuk mencapai *feminist standpoint*. Hal ini dikehendaki oleh perkembangan kesadaran feminis yang akan memberikan pemahaman yang lebih baik pada sumber-sumber ketertindasan wanita dan dunia.

Klaim *standpoint* bukanlah untuk menguniversalisasikan kewanitaan, tetapi mendesak implikasi dari dualitas publik-privat dan implikasi perbedaan *gender* dalam dunia sosial dan pembentukan identitas. *Feminist postmodernisme* mengangkat kritik-kritik *postmodernisme* dan berkeinginan untuk menciptakan suatu pendirian. Feminisme ditarik ke arah sifat *post positivist* dari *postmodernisme* tetapi menolak ketidak sensitifan *gendernya*. Bagi para pendukung *feminist postmodernisme*, konsep tentang wanita itu sendiri dalam dirinya mengandung problematika karena penerapan perempuan sebagai kategori analisis mengandaikan bahwa semua orang yang berjenis kelamin dari berbagai kelas dan budaya, secara sosial dianggap sebagai kelompok yang homogen (Ambarwati & Subarno W, 2015).

HASIL PENELITIAN

Pada awal perkembangan kesetaraan *gender* di abad 19, Uni Eropa masih berfokus pada pembangunan pasar tunggal untuk memperbaiki ekonominya sehingga tidak begitu

fokus atau tidak memperhatikan akan isu-isu yang sedang terjadi. Uni Eropa mulai memfokuskan kepada isu kesetaraan *gender* mulai di abad ke 20 tetapi Uni Eropa masih lambat dalam menanganinya, kemudian di abad ke 21 lah Uni Eropa baru dapat dikatakan mulai mampu untuk mengatasi isu kesetaraan *gender* ini, bahkan sudah ada beberapa negara didalamnya yang dilihat mampu dan berhasil menjadi negara yang memiliki nilai keadilan *gender* tertinggi.

PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender di Uni Eropa dari Perspektif Feminisme

Perjuangan pergerakan-pergerakan feminisme di Uni Eropa berawal pada abad ke 19 dan berhasil memberikan hasil yang nyata. Kemudian berlanjut pada abad ke 20, dimana terdapat gerakan feminisme lain yang bernama *Women's Suffrage*. Gerakan tersebut mempunyai tujuan untuk menuntut hak politik bagi perempuan. Finlandia merupakan negara pertama di Eropa yang resmi memberi kesempatan kepada perempuan untuk menentukan hak pilih dan hak dipilih dalam urusan politik negara nya pada tahun 1906. Kemudian kebijakan baru ini dilanjutkan oleh Spanyol, Perancis, Italia dan negara-negara Eropa lainnya (Galligan, 2010). Dengan adanya gerakan feminisme ini dinilai semakin meluas dan semakin banyaknya isu *gender* yang diangkatnya, gerakan ini juga memiliki berbagai gelombang, mulai dari gelombang pertama sampai dengan gelombang ketiga yang dimana setiap gelombang memiliki tugas dan fokus untuk tuntutan hak kesetaraan *gender* yang berbeda-beda (Krolokke & Sorensen, 2006).

Dari akhir abad 20 ke awal abad 21, isu kesetaraan *gender* menjadi salah satu pemikiran, bahan pembicaraan dan evaluasi untuk program kerja Uni Eropa. Akan tetapi, hal ini tidaklah mudah untuk merubah pandangan dan pola pikir seseorang yang sudah meyakini akan kesenjangan *gender*. Untuk merealisasikan kesetaraan ini, Uni Eropa membutuhkan waktu yang sangat lama dan perlu melakukan banyak perubahan serta pengupayaan yang intens dari berbagai pihak karena pada saat itu kesenjangan masih tinggi, sehingga dalam konstitusi maupun praktiknya untuk mencapai kesetaraan *gender* yang tinggi dibutuhkan waktu yang tidak singkat.

Perkembangan kesetaraan *gender* di Uni Eropa pada akhir abad ke 20 ini menjadi tanda bahwa penggunaan pendekatan pengarus utamaan *gender* akan dimulai agar terjadinya pendekatan antara Uni Eropa terhadap peningkatan nilai kesetaraan *gender*. Pada

abad ini, Uni Eropa juga mengalami peningkatan kesetaraan *gender* yang sangat banyak meningkat, terutama di negara-negara Eropa bagian Utara yang sejak awal memang sudah menempati peringkat atas mengenai kesetaraan *gender* dan menjadi model bagi negara lain untuk mengatasi isu kesetaraan *gender* serta Uni Eropa juga turut membantu upaya untuk meningkatkan kesetaraan *gender* di negara-negara yang bukan Uni Eropa. Uni Eropa mulai membahas mengenai kesetaraan *gender* di tahun 1957 tentang kesetaraan gaji atau upah kerja antara perempuan dan laki-laki didalam kebijakannya (*European Commission*, 2011). Uni Eropa juga melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap pekerja perempuan, mengingat bahwa pada saat itu perempuan dipandang sebagai kaum yang lemah dan tidak adanya hak yang layak, maka hal ini sangatlah penting. Namun, kenyataannya kondisi ketidaksetaraan masih sering terjadi dalam segi ekonomi.

Hasil penelitian membuktikan bahwa hingga tahun 1996, rata-rata pengangguran perempuan di Uni Eropa lebih besar daripada laki-laki (Rossilli,1999). Hal ini disebabkan oleh tidak adanya rekonsiliasi waktu bagi perempuan antara pekerjaan dan rumah tangga. Perempuan masih memiliki pekerjaan lain yaitu menanggung pekerjaan rumah tangga sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk memiliki pekerjaan publik. Oleh karena itu, pemerintahan Uni Eropa memberikan dukungan atas hak perempuan seperti, adanya cuti untuk mengurus anak setelah lahiran (*parental leave*) dan cuti hamil ketika ingin lahiran serta fasilitas perawatan anak sebagai tempat untuk menitipkan anak agar dapat bekerja publik dalam waktu penuh. Dukungan rekonsiliasi ini baru mulai diwujudkan oleh Uni Eropa di akhir abad 20 (Lewis, 2007). Kesetaraan *gender* dalam kesempatan kerja dan anti diskriminasi telah dilegalkan sejak lama dalam kebijakan-kebijakan Uni Eropa, namun konstruksi pembagian peran *gender* cenderung kuat keberadaannya.

Perkembangan kesetaraan *gender* di bidang pendidikan juga telah diangkat oleh Uni Eropa pada tahun 1992, dimana terdapat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan dan laki-laki, hal ini karena pemberlakuan pengarus utamaan *gender* pada tahun 1995 sehingga dengan bertambahnya pendidikan tinggi yang dimiliki oleh perempuan membuat posisi pekerjaan perempuan yang tadinya lebih rendah dari laki-laki pada akhirnya akan membuat permasalahan yang lebih besar mengenai ketidaksetaraan terhadap upaya yang didapat (*European Parliament*, 2015).

Abad 21, peningkatan partisipasi politik perempuan diupayakan oleh Uni Eropa melalui berbagai program, kebijakan dan strategi yang dilakukan. Strategi peningkatan

kesetaraan *gender* di Uni Eropa menghasilkan perkembangan terhadap upaya pemberdayaan perempuan di dalam politik. Dari adanya perspektif feminisme membuat stereotype perempuan yang konservatif hilang dan adanya kesempatan bagi perempuan untuk menikmati hak yang setara dengan laki-laki menjadi lebih terbuka di Uni Eropa. Feminisme mampu meningkatkan kapasitas perempuan untuk lebih berpendidikan, ahli, mandiri, dan pada tujuan akhirnya adalah untuk dapat setara dengan laki-laki yang pada kenyataannya mempunyai kualitas untuk bersaing lebih tinggi.

UN Women dalam Memajukan Kesetaraan *Gender*

United Nations Women merupakan entitas PBB yang didedikasika untuk kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan. UN Women didirikan untuk mempercepat peningkatan kesetaraan *gender*. UN Women bekerja bersama pemerintah dan masyarakat sipil untuk membuat kebijakan, program dan layanan yang diperlukan dalam standarisasi kesetaraan *gender* yang efektif dan bermanfaat bagi seluruh perempuan yang ada di dunia. UN Women bekerja dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadikan kenyataan bagi perempuan dan mendukung partisipasi kesetaraan perempuan dalam aspek kehidupan dengan empat prioritasnya yaitu wanita memimpin, berpartisipasi dan mendapatkan kesetaraan dari sistem pemerintahan yang ada, perempuan memiliki jaminan pendapatan dan pekerjaan yang layak, perempuan dapat menjalani kehidupannya dengan bebas dari segala bentuk kekerasan, perempuan berkontribusi dan memiliki pengaruh besar dalam membangun pertahanan, keamanan dan perdamaian dunia. UN Women juga mengkoordinasikan sistem kerja PBB dalam memajukan kesetaraan *gender* melalui semua musyawarah dan kesepakatan yang terkait dengan Agenda 2030. (About UN Women, unwomen.org diakses 21 Desember 2020).

Kesetaraan *gender* dan hak asasi perempuan tercermin secara menyeluruh di seluruh elemen agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, yang disetujui pada sidang umum pada September 2015. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa "*mempertimbangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan melalui semua tujuan dan sasaran, akan memberikan kontribusi besar untuk kemajuan*". Dalam hal ini, pilihan untuk memantau pelaksanaan Agenda 2030 sangat penting dan sangat menentukan apakah upaya negara-negara sedang disalurkan dengan benar dan apakah mereka mencapai apa yang ditujukan dan ditargetkan. UN Women juga mempresentasikan teknis global indikator untuk memantau kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan dengan

adanya pemberdayaan ekonomi perempuan, dari kaitannya dengan penggunaan waktu dan pekerjaan rumah tangga serta perawatan tidak berbayar dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. (lac.unwomen.org diakses 21 Desember 2020).

Agenda 2030 ini meletakkan dasar untuk pemantauan yang kuat dan responsif terhadap *gender* dengan menunjukkan bagaimana kesetaraan *gender* sangat penting dalam pencapaian SDG, menjelaskan kesenjangan dan tantangan *gender* untuk pemantauan dan menetapkan titik awal berbagai indikator terkait *gender* dan menetapkan agenda untuk memperkuat akuntabilitas komitmen kesetaraan *gender* di tingkat global, regional maupun nasional (unwomen.org diakses 21 Desember 2020). Hal yang perlu menjadi fokus UN Women ialah UN Women perlu lebih terlibat dalam forum kebijakan internasional karena perspektif *gender* masih sangat tertinggal dan tidak dijadikan fokus utama dalam proses pembuatan kebijakan (Domingo, 2013).

Kerjasama UN Women dan Uni Eropa

Meningkatnya kasus diskriminasi terhadap perempuan menjadikan kejadian tersebut dianggap sebagai hal yang wajar karena sudah terlanjur menjadi suatu kebiasaan dalam budaya patriarki. Dari kejadian tersebut membuat UN Women bersama Uni Eropa menjalin kerjasama untuk membantu melawan pandangan budaya patriarki untuk memajukan kesetaraan demi terbebasnya dari diskriminasi yang terjadi pada perempuan di dunia. Dalam hal ini UN Women dan Uni Eropa bekerjasama melakukan program untuk mencapai kesetaraan *gender*. Program-program ini sudah ada yang dikenal oleh masyarakat dunia, namun masih ada juga yang belum cukup dikenal. Program ini yaitu kampanye *He For She* yang dilaksanakan setiap 25 November untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di dunia dengan menggunakan pendekatan feminisme. Seperti yang dikatakan oleh Jameshed Kazi bahwa selama ini perempuan seringkali mengalami tindakan kekerasan dimanapun keberadaannya dan tindakan tersebut tidak memandang hal apapun. Kampanye ini memiliki fokus untuk menekankan partisipasi perempuan dan laki-laki untuk berhenti menormalisasi kekerasan yang terjadi pada perempuan.

Kemudian, UN Women dan UE juga menggelar diskusi publik mengenai hak perempuan untuk berkehidupan bebas dan terhindarnya dari segala bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan serta bagaimana kontribusi warga negara agar tercipta dunia yang bebas dari kekerasan. Program ini diselenggarakan dalam rangka awal mula kampanye ini dengan mengutamakan anti kekerasan terhadap perempuan di dunia dan berfokus terhadap

pengecambahan demi mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, membahas norma sosial diskriminatif yang dampaknya terhadap perempuan serta memikirkan cara agar laki-laki dapat terlibat dalam memajukan kesetaraan *gender* dan hak perempuan.

Program lainnya yaitu UN Women dan UE bekerjasama untuk mendorong hak ekonomi perempuan di Asia, dalam program ini memunculkan We Empower Asia yang diupayakan akan berjalan selama 3 tahun untuk mendorong sektor swasta demi meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan di negara Asia agar terbentuknya lingkungan bisnis yang mendukung pemberdayaan perempuan, meningkatnya kapasitas wirausahawan perempuan agar dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan lain serta implementasi prinsip pemberdayaan perempuan untuk mendukung perusahaan. Dalam hal ini Uni Eropa memiliki hasil nyata dari komitmennya untuk mencapai kesetaraan *gender* dan respon pergerakan dunia untuk mengajak kerjasama perusahaan dalam memperkuat partisipasi suara perempuan di lingkungan kerja.

Selain itu, UN Women dan UE juga menyelenggarakan kompetisi komik dan kartun yaitu Planet 50-50 pada tahun 2030: Meningkatkan Kesetaraan *Gender* dengan menggambar situasi kesetaraan serta hak dan pemberdayaan yang diadakan di Indonesia agar mengetahui perubahan apa yang ingin dilihat. Dengan adanya kompetisi ini diharapkan dapat merangkul masyarakat agar dapat menghadapi tantangan dan mencapai kesetaraan *gender*. Kompetisi ini juga menjadi sarana yang sangat kuat untuk mempromosikan demi kemajuan kesetaraan *gender* di dunia.

Kemitraan antara UN Women dan Uni Eropa dalam pandangan feminisme dapat dilihat bahwa tujuan dari kedua belah pihak ada pada tipologi *feminist standpoint* karena tugasnya memberikan pemahaman dan menampakkan asumsi serta pandangan yang umum mengenai kesetaraan *gender* yang dimana UN Women dan Uni Eropa mengupayakan program-programnya untuk memajukan kesetaraan atas keadaan hidup sosial perempuan yang seringkali terdiskriminasi. Oleh karena itu, UN Women dan Uni Eropa ingin menunjukkan bagaimana perempuan harus diposisikan dengan sepiantasnya tanpa membedakan status dan *gender* agar dapat mencapai struktur kekuasaan yang sama.

Adanya UN Women, Uni Eropa dapat mencapai seluruh komitmennya. Komitmen kuat UE dalam mendukung Agenda PBB tahun 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempercepat memajukan kesetaraan *gender* serta pemberdayaan perempuan di seluruh dunia.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Ketidaksetaraan menjadi kesetaraan *gender* adalah isu kritis yang sudah terjadi di dunia. Namun dibalik semua itu, kaum perempuan telah mencapai kemajuan akan pemberdayaan dan kesetaraan dan tentunya hal tersebut selalu terdapat tantangan dan tidaklah mudah untuk dihadapi dan ditanggapi. Hal ini lah yang menjadi alasan terbentuknya UN Women sebagai implementasi dari adanya feminisme untuk menciptakan kemajuan kesetaraan terhadap perempuan dan diperjuangkannya hak perempuan. Uni Eropa, sebagai negara yang dianggap memiliki nilai kesetaraan *gender* yang tinggi menjadikannya dipandang bahwa negara tersebut mampu membantu negara lain untuk memajukan kesetaraan *gender*.

Bermitranya UN Women dan Uni Eropa dengan tujuan yang sama membuat keduanya berhasil dalam menghentikan kesenjangan *gender* dan menghentikan tingkat tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan menjadi suatu peningkatan dalam memajukan kesetaraan *gender*. Dengan adanya program-program yang dibentuk oleh UN Women dan Uni Eropa menjadi keberhasilan suatu negara untuk mencapai kesetaraan *gender* seperti di negara Indonesia.

SARAN

Adanya UN Women ini yang berupaya untuk mengurangi kesenjangan *gender* serta mencegah kekerasan pada perempuan, oleh karena itu penting sekali untuk tetap menjalankan program-program yang menyangkut kesetaraan *gender* seperti tetap mengkampanyekan kesetaraan *gender* agar dapat memberi kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat dunia terutama masyarakat awam yang masih memegang tradisi leluhurnya tentang pembagian posisi wanita dan pria dimana lebih banyak merugikan pihak wanitanya, sehingga dengan maraknya kampanye kesetaraan *gender* akan memberikan pengetahuan tentang seimbangannya peran wanita dan pria dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Caribbean, U. W. (2015). *Monitoring Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in the 2030 Agenda for Sustainable Development: Opportunities and Challenges for Latin America and the Caribbean*. Retrieved DESEMBER 2020, from UN WOMEN: <https://lac.unwomen.org/en/digiteca/publicaciones/2015/09/monitoreo-genero>

Charlotte Krolokke, A. S. (2005). *Gender Communication Theories and Analyses: From Silence to Performance*. SAGE Publications.

Concepts and definitions. (n.d.). Retrieved 2020, from European Institute for Gender Equality: <https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions>

Galligan, Y. (2010). *Gender democracy: the legacy of the 20th century* .

Gerry Stoker, D. M. (2010). *Teori dan metode dalam ilmu politik*. Nusa Media.

Lewis, J. (2007). *Work, Care, Gender Equality and the Problem of 'Instrumental' Social Policies*.

Pilar Domingo, T. O. (2013, September). *The contribution of UN women to increasing women's leadership and participation in peace and security and in humanitarian response*. Retrieved Desember 2020, from ODI: <https://www.odi.org/publications/8431-contribution-un-women-increasing-womens-leadership-and-participation-peace-and-security-and#downloads>

Resti Fauziah, N. M. (2015). *Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender*.

Rossilli, M. G. (1999). *The European Union's Policy on the Equality of Women*.

Service, E. P. (2020). *Towards a new EU gender equality strategy*.

Sorensen, R. J. (2013). *Introduction to International Relations : Theories and Approaches*.

Tim Dunne, M. K. (2016). *International Relations Theories : Discipline and Diversity*. United Kingdom: Oxford Univeristy Press.

Uni Eropa dan UN Women menyerukan untuk mendorong kemajuan dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. (2019, NOVEMBER 25). Retrieved DESEMBER 2020, from EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION SERVICE: https://eeas.europa.eu/delegations/tchad/70944/node/70944_az

Wijatmadja, Subarno dan Ambarwati. (2016). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. In Ambarwati dan Subarno Wijatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (pp. 52-54). Malang: Intrans Publishing.

WOMEN, U. (2018, February 18). *Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Retrieved from UN WOMEN: <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018>

WOMEN, U. (n.d.). *ABOUT UN WOMEN*. Retrieved DESEMBER 2020, from UN WOMEN: <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>